

SKRIPSI



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAKKEN DARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UPTD SAMSAT WILAYAH PANGKEP

**OLEH
ANDI MULYA TENRI JAJA
B 121 13 514**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UPTD SAMSAT
WILAYAH PANGKEP

OLEH

ANDI MULYA TENRI JAJA

B121 13 514

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UPTD SAMSAT WILAYAH
PANGKEP**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MULYA TENRI JAJA
B121 13 514**

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 16 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima**

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Abdul Razak, SH, MH
NIP. 19571029 198303 1 002**



**Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH
NIP. 19680711 200312 1 004**

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Andi Mulya Tenri Jaja
Nomor Induk	: B 121 13 514
Prodi	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH
NIP. 19680711 200312 1 004



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI MULYA TENRIJ
Nomor Pokok	: B12113514
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, SII., MH
NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

Andi MulyaTenri Jaja (B12113514). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Razak,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Aspan,SH.,MH selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini yaitu Kepala UPTD SAMSAT wilayah Pangkep Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan data skunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literature, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam hal ini menjadi penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPTD SAMSAT wilayah pangkep dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri. Adapun yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni proses administrasi dengan Sistem komputerisasi, pelayanan wajib pajak melalui SAMSAT Keliling, serta kemudahan pembayaran Pajak dari jarak jauh, dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dengan ketentuan pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA.

ABSTRACT

Andi MulyaTenri Jaja (B12113514). Legal Review Against the Implementation of Motor Vehicle Tax Collection On the UPTD SAMSAT Pangkep Area guided by prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH as First Advisor and Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH as Supervisor II.

This study aims to determine the implementation of tax collection of two-wheeled vehicles in Pangkep District and to determine the factors that influence the implementation of tax collection of two-wheeled vehicles in Pangkep regency.

The research was conducted at the Office of Regional Income Agency of South Sulawesi Province UPTD SAMSAT Pangkep Area. Types of data sources in this study are primary data which is a direct interview with related parties in connection with this writing that is Head of UPTD SAMSAT region Pangkep Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province and secondary data which is data obtained indirectly derived from the legislation , Literature, reports, books and scientific papers related to the author's discussion.

From the research conducted, the authors get the following research results. (1) The implementation of motor vehicle tax collection at UPTD SAMSAT Pangkep Region is still not optimal. This is evident from the realization of arrears of motor vehicle taxes are still low at the Office UPTD SAMSAT Pangkep Region. (2) Factors that influence in this case become inhibitor of taxation of two-wheeled motor vehicle at UPTD SAMSAT area pangkep service area of South Sulawesi Province that is still low awareness of Taxpayer to perform obligation pay taxes, data of incomplete taxpayer, Motorists without being behind names, vehicle owners move to other areas, and withdrawal of vehicles from the financing without any reports from the owners of motor vehicles or from the financing itself. The supporting the implementation of tax collection of two-wheeled vehicles at UPTD SAMSAT Pangkep Region Regional Income Board of South Sulawesi Province that is the administrative process degan Computerized system, taxpayer service through SAMSAT Roving, as well as ease of payment Tax from a distance, in this case all taxpayers can Make payments to the existing SAMSAT UPTD throughout South Sulawesi with the provision that the tax to be paid is not in arrears other than that the payment system is only valid until 12.00 WITA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep" dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi jenjang strata 1 (S1) dan untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidaklah mudah namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan, bimbingan, dorongan, motivasi, serta kerja sama dari berbagai pihak segala kendala maupun rintangan tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang teramat tulus kepada semua pihak yang telah membantu terutama kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta H. Andi Aminullah A. Achmad (Alm) dan Ibunda tercinta Hj. Andi Masnah S. Spd yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat dan doa yang tiada hentinya demi kebaikan penulis di dunia maupun di akhirat. Dan juga kepada semua saudara-saudariku yang menjadi inspirasi dalam hidup saya Ipda

Syahrudin,SH., Andi Dinda Putri,SE., Andi Nanda Bagoes Putra,ST., Adelyana Eka Putri, dan Andi Rahmat Aggie,SE serta keponakanku Agung Walhidayat dan Naila Ariqah, terima kasih telah memberikan perhatian, cinta, inspirasi, berbagai canda tawa serta mendampingi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, terselesainya skripsi ini juga berkat dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima Kasih penulis yang teramat tulus haturkan kepada kedua pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H., selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis, Beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ASAS 2013, dan Keluarga Besar FORMAHAN;
8. Ibu Wahyuni Amir, S.Sos selaku Kepala UPTD Samsat Wilayah Pangkep dan seluruh pegawai Samsat Wilayah Pangkep yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis dalam pemberian kelengkapan data-data guna penyelesaian skripsi ini;
9. Untuk seluruh Staff Organisasi dan Tata Laksana Kantor Wali Kota Makassar, penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya kepada penulis selama Magang;
10. Untuk Sahabat-sahabatku dari SMP sampai sekarang (BFF Awrekeh Fans Club) Henny Priscilla Yunita, S.E., Anisa Nurfajrin Bakri, Amd.Keb., Nurul Fitriani Syarif, S.Mat., Andi Vebryanti, SP dan Azizah Baity Ali, S.Tr., Ft Terima kasih karena selalu ada disaat suka maupun dukanya

penulis, selalu memberikan support kepada penulis dan memberikan motivasi untuk penulis selama ini utamanya dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

11. Untuk sahabat baru semenjak ketemu di Fakultas Hukum UNHAS Geng Tegang, Masyita Rahman,S.H., Valdi,S.H., Zuryat Fadel Rahmatullah,S.H., terima kasih selalu ada menemani sejak semester awal hingga akhir dan berbagi cerita suka maupun duka, serta sahabat FH UH HAN lainnya, Dewina Sri Antasari,S.H., Asfira Askar,S.H., Yoan Karunia,S.H., Arridha Fajrin,S.H., Muh.Fauzy Mustari,S.H., A.Dzaral Al Ghifari,S.H., Yudi Hermawan,S.H, A.Adi Surya,S.H., Aqisyah,S.H., Nur Adilah Zainuddin,SH., Harfira Rizky,S.H., dan semua teman HAN yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sahabat baru yang selalu membantu dan menemani penulis mengurus di kampus, utamanya dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Untuk sahabat lainnya Jannatan Hariyra,S.E., Widya Apriani,S.Sos, Titi Dwi Yuliarti,Amd.,Keb., Annisa Nur Ilahi,S.Ak., dan Rezky Amalia,S.ST., terima kasih atas waktu dan supportnya untuk penulis selama ini.

13. Special untuk teman baru berapa bulan Rhby Sangadji,S.I.Kom., terima kasih selalu menemani penulis disaat suka maupun duka, selalu menyemangati penulis utamanya dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Terima kasih kepada Keluarga Besar Balocci Squad Utamanya Paman tercinta Dr. Andi Makkasau,M.Si dan Tante tercinta Nuraeni,S.Pd.,M.Pd., sepupu tercinta Andi Nur Maharani,S.Pd., Andi

Aswar, Andi Emir, Andi Nadyah, Anggun, dan semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena ketulusannya membantu penulis selama ini dan selama pembuatan skripsi ini.

15. Untuk sahabat-sahabat KKN REULER Gel. 93 di Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep (Ida Ayu Ami, S.Sos., Ichram Juliana, S.Si., Fajar Sidiq, S.S., Muhammad Faisal, S.T., Nashrullah, S.K.G., Gledis Akari, S.P) terima kasih karena sudah mau berbagi perhatian kurang lebih 2 bulan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

16. Untuk tante Hj. Nurindah Sari, Zulfajri Adi Saputra, SE., Siti Nurhalisa dan keluarga terima kasih atas perhatiannya selama ini dan terima kasih atas supportnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 6
A. Pajak	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	10
3. Jenis-jenis Pajak	12
4. Teori Pemungutan Pajak	14
5. Asas Pemungutan Pajak.....	18
B. Pajak Daerah	22
1. Pengertian Pajak Daerah.....	22
2. Jenis-jenis Pajak Daerah	23
C. Pajak Kendaraan Bermotor	25
1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	27
D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	29

1. Undang-Undang Dasar	29
2. Undang-Undang	31
3. Peraturan Gubernur	34
E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	35
F. Sanksi Administrasi	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep	45
B. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak diterima yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Sedangkan menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.²

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.³

Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki

¹ Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

² Ibid

³ Desak Widhiatuti, 2016, *Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3

berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁴ Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”⁵

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).⁶ Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi Pemerintah, yaitu : Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero)

⁴ Ibid.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.⁷

Namun, dalam proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Daerah Wilayah Pangkep periode Desember 2016 yaitu Rp.1.224.174.101.568,-. Khusus

⁷ Wawancara dengan Rizal Abdullah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 April 2017.

kendaraan bermotor Roda Dua tercatat data tunggakan pajaknya sebesar Rp.628.961.472.329,-.⁸

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh UPTD Samsat di Kabupaten Pangkep?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pangkep.

⁸ Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Wilayah Pangkep Periode Desember 2016, Sumber Data dari Kantor Badan Bendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Berkaitan dengan definisi Pajak, M.J.H Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.⁹

Selanjutnya Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁰

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran pajak dilaksanakan atas dasar undang-undang, konsekuensinya apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, undang-undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan, dan lain-lain merupakan

⁹ Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.9.

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22.

manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat.

Menurut Rahmat Soemitro bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.¹¹ Kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.

Selanjutnya, Lima belas tahun setelah itu Rochmat Soemitro memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat suatu

¹¹ Ibid., hlm.22.

imbangan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara.¹²

Pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. Sebenarnya pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang bernuansa publik sehingga sifatnya memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara dan tidak ada tegen prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihan dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.¹³

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pajak itu adalah satu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat menarik sebagian daya beli rakyat untuk Negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka

¹² *Ibid.* hlm 23.

¹³ *Ibid.*

dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

3. Perpindahan ini berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayar pajak dan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditunjukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin lebih banyak menggunakan prestasi dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana atau kesehatan.
5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan wajib yang bersifat

memaksa yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warganya yang akan digunakan untuk membiayai penggunaan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁴ Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran memiliki keseimbangan.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini pemerintah

¹⁴ Richard Burton dan Wirawan Ilyas, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.8.

menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan pemerintah.¹⁵

c. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak memiliki fungsi pemerataan artinya yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut Ma'rie Muhammad, fungsi pajak adalah:¹⁷

¹⁵ Sri Pudyatmoko, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi offset, Yogyakarta, hlm.19.

¹⁶ Richard Burton dan Wirawan Ilyas, *Opcit*

¹⁷ Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak adalah alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi

Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmurnya masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, Fungsi pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

3. Jenis-Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek pajak.

1. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁸
 - a. Pajak langsung

¹⁸ Erly Suandy, *Opcit*, hlm 40.

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

2. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁹

a. Pajak negara (pusat)

Adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan dalam lingkup direktorat jendral pajak. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak daerah (lokal)

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.

Contohnya pajak bumi dan bangunan.

¹⁹ Ibid., hlm.41.

3. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:²⁰

a. Pajak subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.

Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.²¹ Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

4. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung Negara untuk memungut pajak antara lain :

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42

²¹ R. Santoso Brotodihardjo, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hlm. 79.

(pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap di pertahankan, sekedar untuk member dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidakpuasan, pun karena ajaran bahwa pajak bukan restribusi maka makin lama semakin berkuranglah teori ini.²²

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka.

Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan restribusi. Untuk kepentingan

²² Dwikora Harjo, 2013, *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm.19.

yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan social, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada pengukurnya, sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas sehingga makin lama teori ini pun semakin di tinggalkan.²³

3. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada Negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengaminkannya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

4. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan

²³ *Ibid*, hlm.20.

pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi mengatur.

5. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 21.

5. Asas Pemungutan Pajak

Masalah pajak tidaklah sederhana memindahkan dana dari masyarakat ke kas negara. Pemungutan pajak dikenakan atas sebagian harta, kekayaan atau penghasilan seseorang atau sebagian keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha berdasarkan wewenang pemerintah selaku pelaksana undang-undang perpajakan. Agar tidak menimbulkan akses dan gejolak dalam pelaksanaannya maka dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan haruslah memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak.

Teori asas pemungutan pajak yang sangat terkenal dan dianut hingga saat ini salah satunya adalah teori "*Four common of taxation*" atau "*The four maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*", yaitu : ²⁵

1. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Keadilan disini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada negara maka negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbale balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung.

²⁵ *Ibid*, hlm. 22

2. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh wajib pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini.

3. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana system pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Asas Economy* (asas ekonomis)

Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya.

Menurut Adam Smith, asas keadilan dalam pemungutan beban pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan. Apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat dipakai

untuk membagi beban pajak yang diperlukan, maka anggota masyarakat harus dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar masing-masing, yaitu sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya berkat perlindungan pemerintah.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan, yakni sebagai berikut : ²⁶

1. *Asas Kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. *Asas Daya Pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.
3. *Asas Keuntungan Istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
4. *Asas Manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

²⁶ Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm.42.

5. *Asas Kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. *Asas Keringanan Beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
7. *Asas Keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Adlof Wagner, pakar perpajakan lainnya mengatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari²⁷:

1. *Asas Politik Finansial*

Pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara, sehingga penyelenggaraan perpajakan harus teliti dan akurat menentukannya.

²⁷ *Opcit.* Dwiko Raharjo, hlm.23

2. *Asas Ekonomi*

Penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya objek pajak atas barang-barang mewah.

3. *Asas Keadilan*

Pungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain, dalam kondisi yang sama diperlakukan pungutan pajak yang sama pula.

4. *Asas Administrasi*

Asas ini menyangkut tentang masalah perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan berapa biaya pajak yang harus dikeluarkan.

5. *Asas Yuridis*

Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh seperti Rochmat Sumitro yang berpendapat bahwa Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten dan

sebagainya. Sedangkan sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.²⁸

Berbeda dengan pandangan Yasin, menurutnya Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tanganya. Dengan Kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.²⁹

Sedangkan menurut Davey, pajak daerah ialah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatn tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.³⁰

2. Jenis-jenis Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk pemerintah provinsi ada 5 (lima) yakni :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor

²⁸ Adrian Sutedi, *Opcit*, hlm. 57

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. (*Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*).

Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Restoran;
- 3) Pajak hiburan;

- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung wallet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.³¹

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.:

³¹ Muhammad Djafar Saidi, *Opcit*, hlm.51

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.³²

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.³³

Dalam Pasal 5 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor" kemudian pada Pasal 5 angka (2) "Wajib

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm. 52

PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor” dan di Pasal 5 angka (3) “Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut”.

Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.³⁴

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor³⁵.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan

³⁴ Marihot Siahaan, *Opcit*, hlm.142

³⁵ *Ibid*, hlm.99

bermoto yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan moto dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih member peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm.100

D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara indonesia adalah negara hukum.³⁷

Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”*. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang.³⁸

Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada

³⁷ *Ibid*, hlm.181

³⁸ *Ibid*, hlm. 6

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “*pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang.³⁹

Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-Undang Pajak sebagai sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).

Walaupun Undang-Undang Pajak masih diberlakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi

³⁹ *Ibid*, hlm. 8

agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-masing.

2. Undang – Undang

Undang-undang Pajak sebagai penjabaran ketentuan Pasal 23 ayat(2) UUD 1945 yang telah diubah dan diganti oleh Pasal 23A UUD NRI 1945 adalah dasar hukum yang bersifat operasional pemungutan pajak, kecuali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak tidak terkait dengan pemungutan pajak, melainkan adalah suatu lembaga peradilan pajak yang menyelesaikan sengketa pajak dengan pejabat pajak atau antara sesama wajib pajak. Dengan demikian, tidak semua Undang-undang Pajak yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat operasional pemungutan pajak, tergantung dari substansi hukum yang dikandungnya.⁴⁰

Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak. Adapun Undang-Undang Pajak dalam kedudukan sebagai pengganti adalah sebagai berikut.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm.182

⁴¹ *Ibid*, hlm.9

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomo 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dirasakan belum mampu menghasilkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang memadai untuk menjawab kebutuhan pengelolaan pemerintahan daerah di era otonomi daerah, sehingga kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Undang-undang yang baru ini memberikan harapan yang lebih baik bagi pemerintahan daerah karena adanya diskresi dalam penetapan tarif, adanya penambahan obyek pajak dan juga adanya sumber pajak yang baru. Namun demikian tetap dilakukan pengkajian yang cermat dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk penerapannya secara efektif di daerah.

Luas cakupan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) tidak hanya tertuju pada pajak daerah yang terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, tetapi termasuk pula Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua jenis pajak ini (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) sebelumnya adalah pajak pusat, berarti pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 telah beralih pengelolaannya kepada kepala daerah karena telah menjadi pajak daerah kabupaten/kota.

Sementara itu, Undang-Undang Pajak dalam kedudukan sebagai pengubah adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan;
- d. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang Pajak, baik dalam kedudukan sebagai pengganti maupun sebagai pengubah tidak boleh mengesampingkan perlindungan hukum kepada wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak-hak tidak mengalami kendala atau hambatan. Bahkan pejabat pajak dapat member bantuan yang dibenarkan secara yuridis sehingga tujuan reformasi hukum, khususnya dibidang hukum pajak dapat tercapai.

3. Peraturan Gubernur

Dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi, maka beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut perlu segera ditindak lanjuti dengan peraturan gubernur.

Peraturan Gubernur biasanya berisi petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggap dapat memperlancar proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah, di Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yakni Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pada angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Kemudian Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor;
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya;
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah juga membahas mengenai Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 angka (1), (2), (3), (4) dan (5) yakni sebagai berikut:

- 1) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- 2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- 3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.

- 4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- 5) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermoto tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kemudian dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai pejabat yang berwenang dalam menetapkan dasar pengenaan PKB :

- 1) Dasar pengenaan PKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Gubernur berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- 2) Perhitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun.

Sedangkan untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor pribadi :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
 1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 2. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 3. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- 2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen)

- 3) Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- 4) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Tarif PKB Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf b tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan serta kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas.
2. Kepelikan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan secara progresif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
3. Tata cara pemungutan Pajak Progresif lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menyatakan : Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Sehubungan dengan tarif pajak kendaraan bermotor, diketahui bahwa tarif pajak yang dianut oleh pajak kendaraan bermotor bervariasi bergantung pada jenis kendaraan yang bermotor termaksud⁴². Dalam arti, pajak kendaraan bermotor sebagai pajak daerah provinsi menganut lebih dari satu jenis pajak, yakni pajak yang bersifat spesifik dan tarif pajak progresif. Hal ini bertujuan untuk member kepastian hukum bagi wajib pajak yang terikat pada pajak kendaraan bermotor bila hendak memenuhi kewajibannya.

F. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana di muat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni : Apabila tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a,b,c, dan huruf d telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Huruf a, b, c, dan huruf d yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut yakni dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

Pendaftaran obyek PKB dilakukan pada UPTD/ Kantor SAMSAT paling lambat:

⁴² Muhammad Djaffar Saidi, Opcit. hlm.156

- a. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan perpanjangan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan bagi kendaraan baru;
- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah;
- d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin;
- e. 90 (Sembilan puluh) hari sejak kendaraan bermotor berada di daerah.

Kemudian masih dalam Pasal 4 yakni ayat (3): Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum secara nyata .

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Pangkep dengan sasaran penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD Samsat Wilayah Pangkep.

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah di setiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak .lanjut dalam

memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik interview (*wawancara*) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawwsu Selatan UPTD Samsat Wilayah Pangkep guna memperoleh data yang akurat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD Samsat Wilayah Pangkep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini.

E. Teknis Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambar keadaan yang nyata mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Pangkep sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep memiliki ketentuan pemungutan mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran, dalam hal ini Peranan Instansi Kepolisian dalam pungutan pajak adalah memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak pada, kemudian pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir peranan PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja adalah menjamin atau membayar biaya rumah sakit wajib pajak yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah UPTD Samsat Wilayah Pangkep. Dalam pemungutan pajak ini, UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dimana Peraturan Daerah tentang Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu Wahyuni Amir.S.Sos (Kepala UPTD Samsat Wilayah Pangkep) bahwa⁴³

“kewenangan pemungutan pajak untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ada 5 (lima) jenis, yaitu masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.”

⁴³ Hasil Wawancara tanggal 8 Mei 2017

1. Subjek PKB Pada Kantor SAMSAT Wilayah Pangkep

Yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep. Yang termasuk dari kendaraan bermotor yaitu roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), kendaraan roda dua yang dimaksudkan yaitu sepeda motor yang dimana roda 3 (tiga) termasuk dalam kendaraan roda 2 (dua).

Adapun pada tahun 2016 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan adalah:⁴⁴

- Subjek PKB yaitu :
 - a. Orang Pribadi (Plat Kendaraan Warna Hitam) sebanyak 82.825 unit
 - b. Umum yang terdiri dari Pribadi, CV, Perusahaan Daerah (Plat Kendaraan Warna Kuning) sebanyak 826 unit
 - c. Instansi Daerah (Plat Kendaraan Warna Merah) sebanyak 1.560 unit

⁴⁴ Data Jumlah Unit Kendaraan yg Terdaftar dan Terbayar Berdasarkan Subjeknya Pribadi maupun Badan di Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep, Sumber Data Dari Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep memungut objek kendaraan yang beroperasi didarat yang terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep.

Pada tahun 2016 jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan terbayar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep sebanyak 85.211 (delapan puluh lima ribu dua ratus sebelas) unit. Dimana obyek kendaraan pribadi/plat hitam sebanyak 82.825 (delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) unit kendaraan, kemudian untuk kendaraan umum/plat kuning sebanyak 826 (delapan ratus dua puluh enam) unit kendaraan, dan untuk kendaraan dinas/plat merah sebanyak 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) unit kendaraan.⁴⁵

Jenis unit kendaraan tersebut dapat terlihat pada table daftar jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan terbayar berdasarkan jenis pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep berikut ini:⁴⁶

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Terbayar Berdasarkan Jenis di Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep, Sumber Data Dari Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep.

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BARU	ULANG	JUMLAH UNIT
1	SEDAN	-	2	2
2	TAXI	-	-	-
3	JEEP	-	20	20
4	ST. WAGON	-	-	-
5	MINIBUS	83	355	438
6	MICROLET	-	-	-
7	BUS	-	2	2
8	MICROBUS	-	2	2
9	PICK UP	23	103	126
10	DOUBLE CABIN	4	3	7
11	L. TRUCK	2	16	18
12	TRUCK	2	10	12
13	DUMP TRUCK	2	21	18
14	TRUCK TANGKI	-	4	4
15	BOX	-	7	7
16	ALAT BERAT	-	34	34
17	AMBULANCE	-	3	3
18	PEMADAM	-	2	2
19	MOBIL JENAZAH	-	-	-
20	SEPEDA MOTOR	489	2. 941	3. 340
TOTAL				

Sumber data: Dari Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep

3. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.⁴⁷

1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Wilayah Pangkep, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Instansi Kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

1. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan
3. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di keal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

⁴⁷ Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
2. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pembeli
4. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep dilakukan dengan cara mengalikan tariff pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada UPTD Samsat Wilayah Pangkep juga memberlakukan Pajak Progresif, pajak progresif yang berlaku efektif pada Januari 2014 didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan dua dan seterusnya, Pajak Progresif berlaku

hanya untuk Kendaraan Bermotor pribadi atas nama pribadi Kendaraan Roda 4 (Empat) keatas dan Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500cc ke atas.

Selain pajak progresif, UPTD Samsat Wilayah Pagkep juga memberlakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai berlaku pada Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Nasional.

Adapun tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud yakni untuk kendaraan bermotor pribadi, kepemilikan pertama sebesar $1,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, kepemilikan kedua sebesar $2,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, kepemilikan keempat sebesar $4,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar $5,5\% \times$ dasar pengenaan PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar $1\% \times$ dasar pengenaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik badan social/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar $0,5\% \times$ dasar pengenaan PKB dan untuk Kendaraan Alat berat sebesar $0,2 \times$ dasar pengenaan PKB.⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

4. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo Pembayaran pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep selama ini hanya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan atau 24% (dua puluh empat persen) setahun. Jumlah 2% (dua persen) ini diambil dan besar

pokok pajak kendaraan bermotor.⁴⁹ Misalnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor seorang wajib pajak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Menurut Ibu Wahyuni Amir. S. Sos (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep) bahwa⁵⁰

“Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan BANK SULSERBAR sebagai kas daerah, dimana hasil penerimaan pajak yang dipungut baik dari Pokok PKB maupun Denda PKB kemudian disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini setelah jam pelayanan selesai maka petugas dari PT. BANK SULSELBAR akan mendatangi kantor pelayanan SAMSAT untuk menerima setoran hasil pungutan pajak pada saat itu.”

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga mengatur mengenai tata cara

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Hasil Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2017

pembukuan dan pelaporan, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebaasan pajak, serta tata cara pemeriksaan.

Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan selanjutnya di buat laporan realisasi penerimaan perjenis pajak secara berkelanjutan sesuai masa pajak. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Sedangkan untuk pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep dimana Gubernur karena jabatannya atau karena permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang benar, mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang disebabkan karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari seja

diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan, permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak, kemudian Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan akan memberikan keputusan.

Dalam hal ini pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak, UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep selama ini mengikuti arahan dari Gubernur yang mengeluarkan surat perintah untuk memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep

1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep antara lain :

a. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi

Selain info layanan pajak dengan sistem komputerisasi, proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor, dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.

b. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling

SAMSAT Keliling merupakan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan sistem yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.

c. Kemudahan Pembayaran Pajak dari Jarak Jauh

Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang disebut SAMSAT LINK. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dengan ketentuan pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA.

Menurut Ibu Wahyuni Amir S.Sos (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep) bahwa⁵¹

“untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu

⁵¹ Ibid.

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari tiga inovasi pelayanan unggulan UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep yaitu Proses Administrasi STNK dengan Sistem Komputerisasi, Info Layanan Wajib Pajak dengan Sistem Komputerisasi, serta Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling, UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep juga membuat inovasi penagihan. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan di antaranya melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak dimana hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Inovasi yang lain adalah *“door to door”* yaitu penagihan pajak secara langsung dimana pejabat pajak kerumah setiap wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Selain itu, inovasi yang lain yang telah dilakukan yaitu *“penertiban”*, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk meurunkan Anggotanya melakukan penertiban di jalan raya, dan pada pelaksanaanya pejabat pajak akan memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor serta melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.”

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan maka laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan, namun peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak sejalan dengan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, terbukti dari data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Daerah Wilayah Pangkep periode Desember 2016 yaitu Rp.1.224.174.101.568,- dan khusus kendaraan bermotor Roda Dua tercatat data tunggakan pajaknya sebesar Rp.628.961.472.329,-⁵²

b. Data Wajib Pajak yang tidak lengkap

Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas.

c. Pemindah tanganan Kendaraan Bermotor tanpa di balik nama

Pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep. Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru

⁵² Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Wilayah Pangkep Periode Desember 2016, Sumber Data dari Kantor Badan Bendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

tidak melakukan pembayaran pajak. Selain merugikan pihak yang namanya terdaftar sebagai pemilik pertama yang tentunya akan di tagih langsung oleh pegawai pajak, kesulitan lain bagi pegawai pajak juga terjadi dalam mencari pemilik kendaraan kedua, dimana hal ini biasanya terjadi bagi wajib pajak yang melakukan pemindahtanganan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki alamat orang tersebut.

d. Pemilik tempat berpindah tempat tinggal

Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh Bapak Aiptu Hamzah Yunus bahwa⁵³

“terdapat juga kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang dimana kendaraan tersebut merupakan kendaraan angsuran yang dibayarkan oleh kantor pembiayaan. Menjadi hambatan apabila terjadi pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi penarikan yang tidak dilaporkan maka kendaraan tersebut dapat menjadi tunggaka pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau pihak

⁵³ Hasil Wawancara pada Tanggal 10 Mei 2017

pembiayaan seharusnya melaporkan kasus itu ditempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep cukup efektif. Namun dalam proses pembayarannya masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu, hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep.
2. Masih adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep, di antara lain:
 - Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - Data wajib pajak yang tidak lengkap;
 - Pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama;
 - Pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lan;

- Penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sanksi yg diberlakukan lebih diperkuat agar Wajib Pajak bisa jera akan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Salah satunya sanksi denda yang diberikan terhitung hari bukan terhitung mulai perbulan, dan ada jangka waktu sampai kapan bisa menunggak.
2. Agar kendaraan bermotor roda 3 diberikan Peraturan Khusus mengenai Kendaraan Bermotor Roda 3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- _____, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Dwikora Harjo, 2013, *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*, Mitra Wacana Media, Bogor.
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marihot Siahaan, 2008, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Kejahatan Dibidang Perpajakan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Richard Burton dan Wirawan Ilyas, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Sri Pudyatmoko, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi offset, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir Ubdang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

C. Artikel, Laporan, Makalah dan Karya Ilmiah

Desak Widhiatuti. 2016. *Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.

Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2016.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH PANGKEP
JL. SULTAN HASANUDDIN NO 33 PANGKAJENE TELP (0410) 323927- Fax.323928

SURAT KETERANGAN

No.070/ 64 /UPT Pangkep/Bapenda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ANDI MULYA TENRI J
Nomor Pokok	: B 12113514
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar

Telah melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data pada Kantor Samsat UPT Wilayah Pangkep Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 02 Mei s/d 02 Juni 2017, untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan judul "***Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada UPT Samsat Wilayah Pangkep***".

Adapun yang bersangkutan selama melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data pada Kantor Samsat UPT Wilayah Pangkep, dianggap cakap dan mematuhi aturan tata tertib yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.

Dikeluarkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 09 Juni 2017

KEPALA UPT WILAYAH PANGKEP, *As*



WAHYUNI AMIR, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
Nip.19710607 199203 2 008